

Mengurai Gagasan Tan Malaka sebagai Bentuk Kontribusi Terhadap Pemerintah Republik Indonesia

Raden Samidi Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Suharno Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Abstract

The purpose of writing this article is to unravel the ideas of Tan Malaka as a form of contribution to the government of the Republic of Indonesia. The type of writing of this article uses the study of literature by exploring each of Tan Malaka's ideas from several of his work books as objects of study and supported by several other works of books, then analyzed inductively. Based on the results of the study, it shows that every revolutionary idea of Tan Malaka has a real contribution in his relationship to build citizens and the state, both seen from the context of nationalism, economy, politics, and human rights. Through Citizenship Education, it is fitting that Tan Malaka be placed on an equal footing with the founders of the Indonesian nation in the hope that every idea contained in his work will be used as a reference to build a better nation in the future.

Keywords

Ideas; Tan Malaka; RI Government

PENDAHULUAN

Tan Malaka merupakan sosok pejuang bangsa Indonesia yang dikenal dengan berbagai kontroversi yang dimilikinya. Tan Malaka memiliki nama asli Sultan Ibrahim, lahir di Sumatera Barat pada tahun 1897. Kehidupan Tan bisa dikatakan tidak sesederhana yang dipikirkan, dengan segala persoalan mulai dari terisolasi dirinya hingga pelarian, terlalu sering dalam bayangan-bayangan penangkapan. Tetapi tidak bisa dipungkiri Tan Malaka merupakan salah satu tokoh penggerak kemerdekaan Indonesia yang cukup ditakuti oleh para kolonialis Belanda disebabkan karena kritik dan semangat untuk merebut kemerdekaan yang tiada henti menyebabkan Tan Malaka dipenjara dan diasingkan ke luar negeri. Selama di dalam penjara, Tan Malaka banyak menghasilkan tulisan-tulisan penggugah semangat kemerdekaan dan kritik-kritik yang ditujukan pada pemerintahan Hindia-Belanda dan pemerintah Indonesia di awal kemerdekaan. Salah satu buku fenomenal

terlahir dari ide dan gagasan Tan Malaka selama di dalam Penjara setelah kemerdekaan adalah Gerpolek (Gerilya, Politik, dan Ekonomi).

Gerpolek merupakan salah satu buku yang ditulis oleh Tan Malaka pada masa pasca kemerdekaan pada tahun ketika dirinya meringkuk di dalam penjara. Pada saat itu, seorang Tan hanya mengandalkan pengetahuan, ingatan, dan percakapan dengan para prajurit serta dari pembacaan buku-buku dan majalah kemiliteran yang dilakukannya lebih dari 30 tahun yang lampau. Gerpolek merupakan konsep perlawanan oleh Tan Malaka, menolak jalur perundingan yang dilakukan pemerintah dengan pihak kolonialis dan imperealis, dalam hal ini belanda dan sekutu. Seperti yang dikatakan Tan Malaka "Tuan rumah tak akan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya". Konsep Gerpolek adalah siasat perang gerilya, baik politik, sektor ekonomi maupun sosial.

Tetapi fakta sekarang, sedikit dari bangsa Indonesia mengenal nama Tan Malaka. Di mata pelajaran Sejarah atau di buku PPKn tidak tampak sepak terjang ketokohan Tan Malaka dalam upaya bela negara. Sangat kontras jika dilihat dari buku Sejarah ataupun PPKn di sekolah, eksistensi dari beberapa tokoh nasional seperti Soekarno-Hatta, Sutan Sjahrir, Dr. Soepomo, Yamin. Tan Malaka seolah-olah orang asing bagi bangsanya sendiri, bahkan dianggap sebagai pemberontak negara. Padahal jika secara objektif melihat dari kacamata sejarah, Tan Malaka sebagai salah satu pejuang revolusi dengan gagasan-gagasan revolusionernya selama 10 tahun dengan tekad yang kuat berupaya untuk merealisasikan gagasannya bersama rakyat Indonesia (Nasir, 2007: viii). Gagasan-gagasan yang dituangkan sebagai bentuk kontribusi dan alat perlawanan untuk tujuan perubahan Indonesia merdeka seutuhnya (Prabowo, 2002: x)

Sehingga penulis dalam hal ini mencoba membedah beberapa gagasan dari Tan Malaka yang merupakan salah satu putra terbaik dimiliki oleh bangsa Indonesia. Melalui buku Gerpolek ini dan ditambah dengan beberapa referensi dari karya Tan yang lain, sekiranya penulis mencoba mengelaborasi dari gagasan Tan Malaka dari beberapa dimensi dan melihat dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai bersumber dari beberapa buku dan dan jurnal ilmiah

dalam mengurai gagasan-gagasan sebagai bentuk kontribusi terhadap pemerintah RI.

PEMBAHASAN

Menakar Nasionalisme Tan Malaka

Berbicara mengenai nasionalisme Tan Malaka, tulisan ini tidak akan cukup mendeskripsikan secara terperinci kontribusi yang didedikasikan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tetapi sedikit memberikan gambaran umum mengenai nasionalisme Tan dalam perjuangannya mempertahankan kemerdekaan. Untuk menakar seberapa besar perjuangan Tan dalam mempertahankan kemerdekaan, terlebih dahulu perlu diketahui teori-teori dasar mengenai konsep nasionalisme.

Dingley (2008: 45) dalam terminologi nasionalisme dimaknai sebagai sebuah ideologi yang dibentuk oleh manusia dengan wujud organisasi politik (negara) dan memiliki kedaulatan berdasarkan persetujuan dan kekhasan budaya. Begitu pula hal yang sama diungkapkan oleh Gellner (1998) bahwa nasionalisme memiliki makna sebagai bentuk komunitas yang memiliki budaya yang sama. Gellner lebih melihat bahwa konsep nasionalisme sebagai kesimpulan logis sebagai panggung untuk sejarah umat manusia yang di dominasi oleh masyarakat industri (Santiago, 2012: 8). Sementara Smith (2010: 37) salah satu tokoh penyumbang terbesar mengenai teori-teori nasionalisme dengan memandang nasionalisme sebagai ideologi, budaya, dan agama dari suatu bangsa. Adapun dasar sebagai ide munculnya nasionalisme dikarenakan adanya persamaan budaya, tempat tinggal yang sama, kebiasaan-kebiasaan, dan hukum yang berlaku dalam

masayarakat, serta sejarah panjang dari dari suatu bangsa tersebut (Mikail, 2014: 88). Greenfeld dalam hal ini memandang konsep dasar nasionalisme sebagai solusi guna menghilangkan penderitaan manusia yang disebabkan oleh adanya ketidakadilan, penolakan, dan penghinaan (Santiago, 2012: 1). Dalam konteks nasional, nasionalisme menuntut adanya sebuah sikap yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan negara dan menempatkan masyarakat Indonesia dalam sebuah persatuan diatas kebhinnekaan demi terwujudnya negara Indonesia yang utuh (Darmadi, 2017: 143).

Dari beberapa teori nasionalisme diatas, bahwasanya ketokohan seorang Tan Malaka dalam pergerakan kemerdekaan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun dalam catatan sejarah Tan Malaka terbilang salah seorang kontroversial dengan berbagai pemikirannya yang memunculkan banyak tafsiran yang menghasilkan pro dan kontra. Dengan stigma negatif dari kebanyakan masyarakat Indonesia yang menganggap Tan tidak layak dijadikan pahlawan nasional karena sebagai salah satu tokoh aliran kiri dan sempat bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Komunis Internasional (Komintern). Tetapi pengabdian Tan Malaka untuk bangsa Indonesia tidak bisa di tepikan mengingat banyak jasa yang disematkan baik dalam bentuk gagasan pemikiran maupun dalam aplikatifnya di dunia pendidikan dan politik.

Terdapat beberapa referensi berusaha menggali peran Tan Malaka selama pergerakan kemerdekaan Indonesia. Awal

kiprah Tan Malaka dalam cita-cita dan harapannya disebarkan pada bangsa Indonesia melalui pendidikan. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Belanda tahun 1919, Tan mengabdikan menjadi guru di sekolah anak-anak kuli kontrak perkebunan di Tanjung Morowa dengan mengajarkan baca tulis dan bahasa melayu (Syaifudin, 2012: 58-59). Selama 6 tahun mengajar di kontrak perkebunan, Tan menyaksikan dan merasakan secara langsung realitas sosial yang tragis dan memilukan yang mendatangkan rasa empati serta meyalut semangat perlawanannya atas praktik kolonialisme Belanda. Semangat mengubah nasib bangsanya sangatlah kuat, sehingga ia mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai seorang guru dan berhijrah ke pulau Jawa. Selama di Jawa, Tan bergabung dengan beberapa organisasi, bermula perkenalannya dengan H.O.S Tjokroaminoto, Darsono, dan Semaun. Perkenalan ini semakin membuka pintu gerbang bagi Tan untuk melakukan perlawanan atas praktik kolonialisme Belanda. Kartodirjo (1975: 262) mengisahkan bahwa semenjak perkenalannya dengan Semaun di Semarang, Tan difasilitasi untuk mendirikan sekolah rakyat yang diberi nama Sekolah Sarekat Islam (SI), yang kemudian dikenal dengan sekolah Tan Malaka yang kemudian berkembang bukan hanya di pulau Jawa, tetapi di luar pulau Jawa seperti Ternate.

Untuk karir politik Tan, berawal dari tahun 1921 dengan menjabat sebagai ketua PKI, kemudian mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI), dan pada tahun 1946, mendirikan Partai Murba (Syaifudin, 2012: 61-62). Tujuan utama Tan bergelut di bidang politik semata-mata untuk mencari

celah dalam melakukan revolusi dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan dari kolonialis Belanda (Fuji, 2017: 42).

Dalam perjuangannya merebut kemerdekaan, Tan menggunakan konsep revolusi. Konsep revolusi Tan terilham dari pemikiran Marx dan Lennin. Revolusi menurut Tan (2008: 79) lahir atas perubahan sosial ketika terjadi pertentangan kelas yang disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan psikologis. Semakin kuat penindasan, maka akan semakin memunculkan reaksi dari masyarakat yang tertindas untuk melakukan perlawanan. Perbedaan revolusi Tan dengan Marx yakni Tan berharap bahwa revolusi sejatinya akan melahirkan tatanan masyarakat baru yang lebih beradab dan negara menghargai nilai kemanusiaan dan hak politik warga negara. Cukup banyak kontribusi yang diberikan oleh Tan Malaka untuk Republik Indonesia. Ia merupakan salah satu pejuang militan, revolusioner, dan melahirkan pemikiran-pemikiran yang bersifat membangun untuk masa depan negara. Separuh hidup Tan diabdikan untuk mengkritik dan melakukan perlawanan pada pemerintah kolonial Belanda.

Gagasan Ekonomi Kerakyatan

Dalam konteks ekonomi, Tan Malaka membuat sebuah frame dalam gagasannya untuk terlepas dari sisa atau kembalinya kapitalisme Belanda, yakni dengan membuat konsep ekonomi berjuang dan muslihat. Konsep ekonomi berjuang menurut Tan dalam gerpoleknya (2010: 83) bahwa secara keseluruhan masyarakat Indonesia harus memiliki andil besar dalam melakukan pelemahan terhadap kapitalisme Belanda

denagan cara merencanakan produksi sebagai bentuk penghasilan, distribusi dengan menyalurkan ke masyarakat, dan pertukaran dagang. Artinya bangsa Indonesia setidaknya 60% memiliki alat produksi sendiri, distribusi, ekspor, dan impor. Dengan secara detail Tan dalam rencana ekonomi berjuang yang diusung mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembagian hasil dan gaji untuk diatur secara tertata dan terencana yang justru bertolak belakang dengan dunia kapitalisme yang tidak mengatur pembagian gaji dan pembagian hasil (Malaka, 2005: 84)

Tan dengan tulisannya mengkritik gaya ekonomi kapitalis Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia, sampai-sampai Tan mengibaratkan kapitalisme sebagai sebuah gedung dan negara-negara di dunia sebagai tiangnya, maka Indonesia merupakan salah satu dari tiang tersebut (Malaka: 1987: 5). Lenin memberikan gambaran dalam kajian ekonomi makro bahwa kekuatan kapital akan melahirkan imperialisme dalam ekonomi dengan melihat sisi seperti: 1) peran konsentrasi ekonomi yang yang dominan, 2) dominasi keuangan sebagai modal, 3) adanya ekspor modal, 4) adanya stratifikasi dari dominasi perusahaan, 5 dan lahirnya stratifikasi dalam dimensi politik (Fuchs, 2010: 34-37). Di dukung oleh tesisnya Hilferding yang mengatakan imperialisme merupakan bagian dari kapitalisme keuangan (Sutton, 2013: 223). Ketika kapitalisme keuangan berkembang, maka kemunculan imperialisme semakin kuat.

Sementara kapitalisme dalam pemikiran Tan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Marx, yakni teori "nilai-lebih" atau yang

disebut dengan teori *meerwaarde* (Syaifudin, 2012: 113). Di dalam buku *Das Kapital*, Karl Marx (2004: 205) memberikan definisi mengenai teori nilai lebih yaitu penetapan kembali nilai harga sebagai suatu jumlah yang nilai produknya melebihi nilai unsur pembentuknya. Masudnya disini bahwa nilai yang dihasilkan oleh pekerja dalam jangka waktu dengan kreatifitas yang berbeda akan melahirkan tingkat surplus yang berbeda. Semakin tinggi nilai produksi pekerja maka tingkat surplus semakin tinggi, begitupun sebaliknya semakin rendah nilai produksi yang dihasilkan pekerja, maka tingkat surplusnya semakin rendah. Sehingga ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial dalam kehidupan para pekerja, yang berakibat pada lahirnya kelas-kelas sosial dan secara otomatis munculnya hegemoni dalam kelas tertentu. Hal ini menjadi kritik keras dari kaum marxian, seperti apa yang diungkapkan oleh Gramsci dengan melihat kepentingan pemilik modal dengan para pekerja, bahwa hegemoni secara dominan lahir dalam perusahaan dan pabrik (Patria & Arief, 2009: 131). Karena di dalamnya terjadi eksploitasi besar-besaran yang menyebabkan timbulnya penindasan terhadap kaum buruh/pekerja demi kepentingan dan keuntungan besar pemilik modal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa arsip yang diungkapkan oleh Roger Knight bahwa sekitar tahun 1890-an para pemilik modal kapitalis Belanda di Jawa dalam menjalankan roda produksi barang di pabrik, merekrut tenaga kerja lokal dengan mempekerjakan banyak perempuan dan anak-anak dengan gaji yang sangat murah sebagai alternatif menekan biaya produksi (Gervase, 2014: 438).

Sebuah kewajaran akan Tan mengkritisi kapitalisme di Indonesia. Karena Belanda sebagai negara kolonial benar-benar ingin menguasai kekayaan bangsa Indonesia dengan membangun pabrik-pabrik di tempat yang strategis, menempatkan alat-alat produksi modern, dan mempekerjakan secara paksa kaum buruh Indonesia dengan sistem upah yang tidak jelas. Para pemilik modal lokal tidak berdaya dengan kekuatan kapital asing yang berakibat pada ketidakteraturan kemajuan ekonomi sebagaimana mestinya. Di desa-desa menghasilkan karet, teh, dan barang pengrajin lainnya, tetapi hanya mengenyangkan dan memperkaya saudagar asing, dan kemiskinan tetap merajalela. Kota-kota bukanlah menjadi pusat ekonomi bangsa Indonesia, malah terus-menerus menjadi sumber ekonomi yang mengalirkan keuntungan para pemodal asing (Malaka: 2008: 42).

Oleh karenanya Tan Malaka dalam hal ini memiliki ide untuk menggerakkan ekonomi sosialis sebagai bagian dari rencana untuk perjuangannya melawan kapitalisme. Konsep dari ekonomi sosialis memiliki dasar tujuan yang mulia yakni kebersamaan, sama rata dan tolong menolong (Malaka, 2005: 104). Terminologi dari ekonomi sosialis dari gagasan Tan Malaka secara ideologis menerapkan ekonomi yang teratur, dimana tingkat produksi diimbangi dengan konsumsi, bukan dalam bentuk anarkis seperti kapitalis (Syaifudin: 2012: 114).

Bentuk nyata dari kekuatan ekonomi sosialis terpampang nyata dalam gerpolek pada bab 13 yakni koperasi (Malaka, 2010: 86). Lebih lanjut Tan menjadikan Koperasi sebagai senjata dalam perang ekonomi

melawan kapitalis Belanda. Masyarakat Indonesia harus bisa menggerakkan koperasi secara masif di mana saja sebagai pengisi perekonomian dan pembantu politik gerilya. Secara garis besar konsep koperasi yang didengungkan Tan disini memiliki arti yakni membuka peluang masyarakat untuk mendapatkan harga semurah-murahnya bagi anggotanya dengan untung dibuat dengan sekecil-kecilnya guna berbagai kepentingan umum saat itu, seperti kepentingan perang gerilya. Karna sebagai bentuk atas perlawanan dari perang dagang kapitalis Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Tan (2010: 87) membagi koperasi menjadi lima bagian yaitu: 1) koperasi produksi, 2) koperasi distribusi, 3) koperasi pengangkutan, 4) koperasi kredit, dan 5) koperasi pasar. Kelima koperasi ini diharapkan bisa diterapkan oleh masyarakat sebagai bentuk atau ciri khas dari sistem ekonomi Indonesia.

Tan Malaka (2010: 11) dalam gerpoleknya mencatat pada awal kemerdekaan Indonesia, semua kebun yang menghasilkan kina, sisal, getah, kopi dan tambang seperti, tambang arang, timah, minyak, emas, perak, dan bauxit, yang ditinggalkan dari sisa Belanda berada di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia. Sedangkan semenjak ditetapkannya putusan perjanjian Lingarjati dan Renville, semua hak milik asing dikembalikan.

Untuk itu Tan menggaris bawahi bahwa untuk bisa memenangkan perang ekonomi melawan kapitalis Belanda, terlebih dahulu masyarakat Indonesia harus bisa memenangkan kekuasaan politik seutuhnya. Karena politik bagi Tan Malaka merupakan pintu pertama dalam upaya mendapatkan

dan mempertahankan kekuasaan dan kemerdekaan. Merebut kekuasaan politik, maka secara tidak langsung meruntuhkan hegemoni ekonomi yang diakukan oleh imperialis kepada bangsa Indonesia.

Tan (2008: 120) memiliki rancangan dalam bidang ekonomi yang dirasa sangat cocok diterapkan oleh bangsa Indonesia di awal kemerdekaan, yang dikenal dengan Program Proletar Indoensia, diantara: 1) pabrik-pabrik menjadi milik nasional, seperti tambang batu bara, minyak, dan emas; 2) hutan-hutan, kebun-kebun seperti kebun karet, gula, teh, kopi, kina dikuasai oleh pemerintah Indoensia; 3) alat transportasi dan lalu lintas dikelola oleh pemerintah; 4) bank-bank, maskapai-maskapai besar menjadi milik nasional; 5) mendirikan industri-insdustri baru dengan bantuan negara seperti pabrik tenun, mesin dan perkapalan; 6) mendirikan koperasi-koperasi rakyat dengan memberikan pinjaman yang murah oleh negara; 7) memberikan perkakasan dan ternak kepada kaum petani untuk memperbaiki lahan pertaniannya dan mendirikan kebun percobaan negeri; 8) melakukan transimigrasi besar-besaran dengan dibiayai oleh negara dari tanah jawa ke tanah seberang; 9) membagi-bagikan tanah yang kosong kepada petani yang tidak memiliki tanah dengan memberikan bantuan dana untuk proses penggarapan tanah; 10) menghapus sisa-sisa feodal dan tanah partikelir dan membagikannya pada petani yang miskin.

Melihat dari Kacamata Politik

Tan dengan gagasan-gagasan beriliannya tidak hanya dilihat dalam ruang lingkup ekonomi saja, tetapi terdapat

beberapa dari hasil pemikiran Tan dalam konteks politik sebagai bentuk perjuangannya melawan kolonialis Belanda. Awal karir politik seorang Tan bermula sekitar tahun 1921 berawal dari keterlibatan Tan di belakang layar pada pemogokan buruh perkebunan Belanda (Poeze, 2008: xvi). Kondisi yang membuat terdesak menyebabkan Tan kembali ke Jawa. Sekitar tahun 1921, Tan menjabat sebagai ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) menggantikan Semaun yang pergi ke Moskow untuk studi. Pengasingan dari beberapa penggagas lahirnya komunis seperti Semaun, Munawar, dan Musso sebagai pionir meletakkan dasar untuk tradisi akademik studi Indonesia ke Uni Soviet (Hill, 2014:622). Tetapi seiring waktu berjalan, pemikiran Tan terbentur dengan beberapa kepentingan politik anggota PKI lainnya, dan pada puncaknya di tahun 1926-1927 ditandai meletusnya pemberontakan Jawa Barat dan di Sumatera Barat. Akibat peristiwa tersebut, Tan melepaskan jabatannya dari ketua PKI. Kemudian mendirikan beberapa partai politik seperti Partai Republik Indonesia (PARI) pada tahun 1927.

Sekitar tahun 1946-1948, Tan mengkritik keras langkah politik yang diterapkan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Gerpolek sendiri menceritakan pada bab-bab awal betapa seorang Tan menolak politik diplomasi pemerintah Indonesia dengan Belanda yang notabene sangat merugikan kedaulatan bangsa Indonesia. Tan mengkritik hasil perjanjian Linggarjati dan Renville yang condong menguntungkan Belanda. Tan Malaka selaku dipihak oposisi sangat menyayangkan keputusan Sjahrir pada

tanggal 27 Maret 1946 yang menyatakan bahwa: 1) supaya pemerintah Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto atas Jawa dan Sumatera, 2) supaya Belanda dan Republik Indonesia bekerjasama membentuk Republik Serikat, 3) Republik Indonesia Serikat bersama-sama dengan Belanda, Suriname, Cuacau, menjadi peserta dalam suatu ikatan kenegaraan Belanda (Pranarka, 1985: 70). Keputusan yang dihasilkan dalam perjanjian Linggarjati menjadi polemik dan menjadi senjata oposisi untuk menggulingkan kabinet Sjahrir. Poeze (2008: 275) menceritakan bahwa oposisi lebih memilih politik bambu runcing sebagai pedoman dalam berjuang dan itu merupakan kehendak rakyat dan pemuda demi cita-cita mereka merdeka 100%. Sehingga dalam situasi ini, Sjahrir tidak bisa berbuat lain kecuali mengajukan permintaan mengundurkan dan Soekarno menerimanya dan untuk sementara waktu presiden mengambil alih semua kekuasaan pemerintahan (Poeze, 2010: 13).

Tan Malaka (2010: 9-10) mencatat di musim perjuangan Indonesia pada awal kemerdekaan, kekuasaan terbentang 700.000 mil persegi, tanah dan air kurang lebih 4,5 juta mil persegi berada di dalam kekuasaan Republik Indonesia. Sementara hasil dari perundingan Linggarjati, hanya Jawa dan Sumatera menjadi kekuasaan Republik Indonesia yang luasnya hanya 210 ribu persegi, atau 30% dari seluruh kekuasaan Indonesia. Keputusan diplomasi Linggarjati sangat merugikan bangsa Indonesia.

Setelah jatunya kabinet Sjahrir, pada tanggal 3 Juli Amir Sjaifudin berhasil membentuk kabinet baru. Kemudian

mealanjutkan perundingan dengan Belanda dalam rangka mendapat pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh dunia internasional (Pranarka, 1985: 72). Hasil dari perjanjian Renville bahkan lebih menyudutkan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Dari hasil perundingan tersebut menyebabkan wilayah Indonesia semakin dipersempit dan tendensi munculnya negara serikat terbuka lebar. Tan (2010: 10) mencatat bahwa hasil dari diplomasi Renville mengakibatkan enam atau tujuh daerah Jawa terbagi dan beberapa di daerah Sumatera serta dua persen tanah dan laut Indonesia di klaim Belanda.

Dengan kata lain, Tan memberikan kesimpulan sebagaimana tertuang di dalam gerpoleknya bahwa diplomasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui perundingan-perundingan berakibat pada kebangkrutan, disebabkan karena strategi yang digunakan tidak konsisten dan matang. Pulau demi pulau dikuasai kembali oleh kolonial Belanda. Pemerintah terkesan bersifat lunak menempuh politik" menyerah sebelum berperang" dan menerima negar-negara boneka Belanda. Sehingga nama pemerintah di mata masyarakat Indonesia tercoreng dengan menjual kedaulatannya. Kekacauan di dalam negeri merupakan akibat dari ketidak jujuran pemerintah yang berakibat pada menurunnya kepercayaan publik tekat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Untuk itu Tan Malaka beserta semua organisasi perjuangan dan partai ke dalam satu organisasi revolusioner guna memerangi kolonialisme Belanda dengan program yang jelas. Tan berhasil menghimpun 141 organisasi politik, laskar, dan partai politik di

Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1946 yang dikenal dengan Persatoean Perjoengan (Poeze, 2010: 39). Satu organisasi yang terseruktur dengan baik menempuh tujuh butir sebagai pedoman dalam haluan politiknya, diantaranya: 1) Indonesia merupakan negara kesatuan yang merdeka sejak 17 Agustus 1945 dan berdasar atas Undang-Undang Dasar yang sudah ditetapkan. Konsekuensi dari ketetapan itu, maka semua kekuasaan asing harus angkat kaki dari wilayah kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu barulah perunding dengan Belanda bisa dilakukan atas dasar kesetaraan; 2) kedudukan dan kedaulatan Republik Indonesia harus dipertahankan dan wilayah yang sudah dikuasai Belanda harus dikuasai kembali; 3) elemen masyarakat yang menentang kedaulatan Republik Indonesia harus di singkirkan; 4) struktur kekuasaan didasarkan pada Demokrasi Berjoeng dari seuruh rakyat yang ikut berjuang. Organisasi orientasinya mulai dari bawah ke atas sebagai bentuk perwujudan pemerintahan rakyat, polosi rakyat, tentara rakyat dengan munculnya harapan akan kemenangan dan menyingkirkan para penghianat bangsa; 5) rasionalisasi dimana semua sumber kehidupan demi kepentingan perang dan kemerdekaan; 6) memperluas perwakilan-perwakilan dan hubungan dengan luar negeri; 7) kompensasi dari rakyat untuk kerugian di pihak musuh melalui penyitaan terhadap harta milik musuh (Poeze, 2010: 40-41).

Semangat Tan yang menggelora untuk mendirikan organisasi Persatoean Perjoengan dimaksudkan untuk mendukung Indonesia merdeka 100 persen, sehingga menarik banyak pengikut akibat dari simpati

masyarakat (Poeze, 2009: 499). Organisasi ini menjadi pijakan pertama guna mewujudkan revolusi nasional melawan kolonialisme dan imperialisme internasional sebagai bagian dari revolusi internasional.

Gagasan Strategi Perang

Gagasan mengenai strategi perang dari Tan Malaka, secara terperinci termuat di dalam buku gerpolek. Sangat menarik terkait gagasan Tan tentang strategi perang yang dimuat dalam bukunya, karena seperti diketahui bahwa Tan merupakan masyarakat sipil bukan dari kalangan militer. Di bab awal, Tan (2010: 18-20) menyinggung tentang jenis perang dengan membagi menjadi dua bentuk perang. Pertama, jenis perang yang dibuat oleh negara dengan memiliki tujuan untuk menaklukkan dan menindas negara lain dengan tujuan perluasan kekuasaan. Perang penindasan ini disebut juga dengan perang imperialisme. Perang ini memiliki ciri-ciri yaitu, a) merebut kekayaan alam baik itu bahan-bahan baku untuk pabrik, bahan makanan, b) semua kekayaan alam negara yang ditaklukkan di bawa ke negeri yang menang, c) negara jajahan dijadikan sebagai alat untuk menanamkan modal baik itu dalam bentuk pabrik, tambang, perdagangan, dan alat transportasi. Kedua, jenis perang yang dilakukan oleh suatu negara untuk mempertahankan diri dan membebaskan bangsanya dari pmerasan dan pniindasan. Peran ini disebut dengan perang kemerdekaan, dimana negara jajahan melawan negara penjajah guna melepaskan diri dari penindasan dan ketidakadilan.

Terkait kasus di Indonesia dalam konteks perlawanan sebelum dan sesudah proklamasi 17 Agustus, dikategorikan

termasuk perang dalam rangka mempertahankan diri dan merebut kemerdekaan (Tan, 2010: 22). Belanda yang notabene sebagai penjajah dengan sangat berusaha menghalangi bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Alasan yang pertama, kekayaan Indonesia yang sangat melimpah, kemudian Belanda mendirikan pabrik, kereta api, perkapalan, dan bank dengan modal yang sangat besar, maka akan sulit bagi Belanda menyerahkan kedaulatan dan kekuasaannya kepada bangsa Indonesia karena berakibat akan membahayakan harta benda dan bangsanya. Kolonialis yang diterapkan di Indonesia sifatnya merusak sebagaimana Adam Smith di dalam teorinya mengatakan bahwa koloni pada dasarnya bersifat merugikan dengan menguras seluruh sumber daya dari negara-negara jajahan sehingga tercipta monopoli di seluruh aspek kehidupan masyarakat jajahan (Williams, 2014: 285). Bagi penjajah, kolonialisme merupakan cara tradisional sebagai jalan keluar terciptanya surplus populasi dan dibentuknya pemukiman baru sebagai akibat dari perluasan wilayah (jajahan) dengan melihat kondisi iklim yang kondusif (Balockkaite, 2013: 152-153)

Untuk itu, Tan memberikan solusi untuk dapat meraih kemerdekaan dari tangan imperialis Belanda yakni dengan melakukan revolusi dengan merebut kemerdekaan 100%. Tan menghendaki melalui gagasannya untuk melakukan perang terbuka, bukan dengan cara diplomasi. Karena dengan melakukan diplomasi, kemungkinan besar akan membuka celah bagi imperialis Belanda untuk mempertahankan tanah jajahannya, dan

terbukti dengan hasil diplomasi melalui perjanjian Linggarjati Renville yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Oostindie (2017: 268) menuturkan bahwa pasukan tentara Belanda sebagai bentuk dekolonisasi setelah kemerdekaan Indonesia memulai kembali menginjakkan kakinya di bumi nusantara pada tanggal 10 Desember 1946-5 Maret 1947 beroperasi di Sulawesi, agresi militer Belanda 1 tanggal 21 Juli-5 Agustus 1947 dan puncaknya terjadi perang gerilya di Yogyakarta pada tahun 1948-1949.

Tan mengisyaratkan perlunya jiwa sang gerilya ditanam pada diri setiap bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dan menyita hak-hak milik musuh. Tan Malaka dalam gerpoleknya memberikan rambu-rambu atau strategi dalam berperang guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Tan merinci beberapa kaidah-kaidah dalam melakukan peperangan sebagai bentuk strategi, diantaranya: 1) melakukan defensif tatkala terdesak dan melakukan offensif tatkala ada peluang, 2) melihat keadaan medan pertempuran, 3) melihat logistik persenjataan, 4) jumlah prajurit, dan 5) pengaturan tempo dalam peperangan (2010: 37-44). Siasat ini sangat membantu bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam merebut kemerdekaan.

KESIMPULAN

Tan Malaka dengan gagasan-gagasan revolusionernya serta kegigihan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan sangatlah patut untuk dijadikan rujukan oleh setiap bangsa Indonesia. Gerpolek sebagai salah satu karya dari Tan Malaka, memuat beberapa gagasan dalam lingkup ekonomi,

politik dan strategi perang sebagai solusi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam lingkup ekonomi, secara jelas Tan terang-terangan melawan kapitalis Hindia-Belanda. Kritik Tan terhadap kapitalisme Hindia-Belanda sangat berdasar karena sangat merugikan bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat praktek penindasan, perbudakan, dan yang tak kalah penting adalah eksploitasi besar-besaran semua kekayaan rakyat Indonesia. Untuk itu Tan memiliki tawaran kepada bangsa untuk menerapkan sistem ekonomi kerakyatan yang berbentuk koperasi. Dibidang sosial-politik, Tan mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin memiliki strategi-strategi politik untuk mencari solusi tepat setiap permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara. strategi Tan tidak menghendaki adanya diplomasi terhadap negara penjajah. Dalam meraih kemerdekaan 100%, dibutuhkan revolusi sebagai solusi untuk melepaskan ikatan-ikatan imperialis Belanda. Sedangkan di bidang militer, Tan menuangkan gagasannya mengenai strategi-strategi dalam berperang. Ilmu kemiliteran sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia guna untuk menempuh kemerdekaan secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Balockaite, R. (2013). Book Review. *Imperialism*, by J.A. Hobson. *Journal capital and class*, 37 (1), pp. 152-153.
- Clough, N. & Holden, C. (2002). *Education for citizenship: ideas into action*. London: Routledge Taylor & Prancis Group.

- Darmadi, H. (2017). Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pemersatu bangsa. Bandung: Alfabeta.
- Dingley, J. (2008). Nationalism, Social Theory, Social Theory, and Durkheim. New York. Palgrave Macmillan.
- Fuchs, C. (2010). New Imperialism: Information and Imperialism? *Global Media Communication*. 6(1), pp. 33-59.
- Fuji, N. (2017). Tan Malaka: putra bangsa yang terlupakan. Yogyakarta: Sociality
- Gervase, W. (2014). Book review. Commodities and colonialism: The story of big sugar in Indonesia, 1880-1942 by Roger Knight. *Colonial south east asia research*, 22 (3), pp. 437-440.
- Hamidi, J. & Lutfi, M. (2010). Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Hill, D. T. (2014). Indonesiaa Political Exiles in the USSR. *Critical Asian Studies*, 46(4), pp. 621-648.
- Kartodirjo, *et al.* (1975). Sejarah nasional Indonesia, jilid IV. Jakarta: Balai Pustaka.
- Malaka, T. (1987). Naar de Republiek Indonesia: Menuju Republik Indonesia. Jakarta: Yayasan Massa.
- Malaka, T. (2005). Merdeka 100%: Tiga Percakapan Ekonomi Politik. Tangerang: Marjin Kiri.
- Malaka, T. (2008). Aksi Massa. Yogyakarta: Narasi.
- Malaka, T. (2010). Gerpolek: Geriliya, Politik, dan Ekonomi. Yogyakarta: Narasi
- Marx, K. (2004). Das kapital: kritik der politischen oekonomie volume 1, cet 1. a.b Oea Hay Djoen. Jakarta: Hasta Mitra.
- Mikail. E. H. (2014). Nationalism concept and turkish nationalism. *International journal of business and social science*, 5 (12), pp. 87-90.
- Nasir, Z. (2007). Tan Malaka dan gerakan kiri Minangkabau. Yogyakarta: Ombak
- Oostindie, G. (2017). The decolonization war in Indonesia, 1945-1949: war crimes in Dutch veteran egodocuments. *War in history*, 25(2), pp. 254-276.
- Patria, N & Arief, A. (2009). Antoni Gramsci: negara dan hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poeze, H. A. (2010). Tan Malaka, gerakan kiri, dan revolusi Indonesia jilid 3 Maret 1947-Agustus 1948. a.b Hersri Setiawan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Poeze, H.A. (2008). Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia jilid 1 Agustus 1945-Maret 1946. a.b Hersri Setiawan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Poeze, H.A. (2009). The cold war in Indonesia 1948. *Journal of southeast asian studies*, 40(3), pp. 497-517.
- Prabowo, H. (2002). Perspektif Marxisme, Tan Malaka: Teori dan Praksis menuju Republik. Yogyakarta: Jendela.
- Pranarka. (1985). Sejarah pemikiran tentang Pancasila. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Santiago, J. (2012). Secularisation and nationalism: a critical review. *Social compass*. 59(1), pp. 1-20.

- Smith, A. D. (2010). *Nationalism: Theory, Ideology, and History*. Cambridge: Polity Press.
- Sutton, A. (2013). Towards an open Marxist theory of imperialism. *Capita & class*, 37(2), pp. 217-237.
- Syaifudin. (2012). *Tan Malaka: merajut masyarakat dan pendidikan Indonesia yang sosialis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Williams, D. (2014). Adam Smith and colonialism. *Journal of international political theory*, 10(3), pp. 283-301.